



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



2025 Triwulan 1

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Miftahul Huda

Penyusun:

R. Tomi Supratomo

Muhajah Babny Muslim

Luh Putu Ayu Damayanti

Enny Syafrida Marpaung

Chairiyanti

Punto Apri Sembodo

Elvanri Anggi

Tasya Annisa

Kontributor:

Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Setditjen PKRL) Triwulan I Tahun 2025. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Setditjen PKRL dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis Setditjen PKRL pada Triwulan I Tahun 2025 dalam rangka melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Setditjen PKRL dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak untuk upaya perbaikan dan pengembangan kegiatan kedepan. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Setditjen PKRL, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan masa mendatang.

Jakarta, 17 April 2025



Miftahul Huda

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Setditjen PKRL) Triwulan I Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Setditjen PKRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Setditjen PKRL Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PKRL terdapat 24 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Setditjen PKRL. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen PKRL Triwulan I Tahun 2025 sebesar 108,86 (termasuk kriteria baik).

Pada Triwulan I Tahun 2025 terdapat 4 indikator yang memiliki target dan tercapai yakni 1) Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Setditjen PKRL tercapai 13,25% dari target 5%; 2) Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PKRL tercapai sesuai target yakni 1 dokumen; 3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPKRL tercapai 88,64% dari target 85%; 4) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Setditjen PKRL tercapai 85,71% dari target 85%.

Pagu anggaran di Lingkup Setditjen PKRL Tahun 2024 adalah Rp133.563.570.000 dengan adanya blokir/bintang (*) pagu anggaran sebesar Rp25.262.283.000. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, realisasi anggaran di lingkup Setditjen PKRL mencapai Rp17.700.471.767 atau 13,25% dari total pagu anggaran.

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan Triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat tantangan yang signifikan dalam pelaksanaan kinerja. Namun, sebagai upaya peningkatan kinerja Setditjen PKRL pada Triwulan I Tahun 2025, terdapat rekomendasi untuk merevisi DIPA dengan menghilangkan alokasi anggaran yang diblokir dan menindaklanjuti temuan BPK secara berkala.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
RINGKASAN EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI.....	VI
DAFTAR GAMBAR	VI
DAFTAR TABEL	VII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUJUAN	1
1.3 ISU STRATEGIS	2
1.4 TUGAS DAN FUNGSI	2
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
3.1 SK 1. TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJERIAL YANG BAIK LINGKUP DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	12
IK 1. NILAI PM SAKIP DJPKRL.....	13
IK 2. NILAI PM SAKIP LINGKUP SETDITJEN PKRL	16
IK 3. NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) LINGKUP SETDITJEN PKRL	19
IK 4. PERSENTASE REALISASI ANGGARAN LINGKUP SETDITJEN PKRL	21
IK 5. NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) LINGKUP DJPCKRL.....	22
IK 6. NILAI MATURITAS STRUKTUR DAN PROSES SPIP UNIT DJPCKRL.....	25
IK 7. LAPORAN SPIP YANG DISUSUN LINGKUP SETDITJEN PKRL	27
IK 8. INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP DJPKRL	28
IK 9. INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP SETDITJEN PKRL.....	30
IK 10. PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA DJPKRL	33
IK 11. PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA SETDITJEN PKRL	35
IK 12. BATAS TERTINGGI NILAI TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LK DJPKRL	36

IK 13. PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN BPK LINGKUP SETDITJEN PKRL	38
IK 14. TINGKAT EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS/STRATEGIS DJPKRL	39
IK 15. PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PELAYANAN PUBLIK	42
IK 16. TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN DATA DJPKRL	46
IK 17. PRESENTASE PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) LINGKUP DJPKRL	49
IK 18. PERSENTASE PENYELESAIAN PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI BIDANG PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	51
IK 19. NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DJPKRL.....	53
IK 20. NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL ASN LINGKUP SETDITJEN PKRL	56
IK 21. PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP DJPKRL.....	59
IK 22. NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DJPKRL	61
IK 23. PRESENTASE PELAKSAAAN KERJASAMA BIDANG PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	63
IK 24. PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN REFORMASI BIROKRASI YANG DISELESAIKAN SESUAI KETENTUAN ...	67
3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	70
BAB IV PENUTUP.....	72
4.1 KESIMPULAN	72
4.2 REKOMENDASI	72
4.3 TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Nilai Capaian Kinerja Setditjen Pengelolaan Kelautan Dan Laut Triwulan I Tahun 2025	9
Gambar 2 Lokakarya Bimbingan Teknis (Bimtek) Kelompok Kerja PUG Di Lingkup Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	50
Gambar 3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut Tahun 2025.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Dan Target Kinerja Setditjen PRKL Tahun 2025.....	5
Tabel 2 Sasaran Kegiatan Dan Indikator Kinerja Setditjen PKRL Triwulan I Tahun 2025.....	9
Tabel 3 Kategori Nilai PM SAKIP	14
Tabel 4 Capaian IK Nilai PM SAKIP DJPKRL Triwulan I Tahun 2025	15
Tabel 5 Kategori Nilai PM SAKIP	17
Tabel 6 Capaian IK Nilai PM SAKIP Lingkup Setditjen PKRL Pada Triwulan I Tahun 2025.....	18
Tabel 7 Capaian IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Setditjen PKRL Pada Triwulan I Tahun 2025.....	20
Tabel 8 Capaian IK Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Setditjen PKRL Triwulan I Tahun 2025	21
Tabel 9 Capaian IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Djpkrl Pada Triwulan I Tahun 2025	24
Tabel 10 Capaian IK Nilai Maturitas Struktur Dan Proses SPIP Unit DJPKRL Pada Triwulan I Tahun 2025	26
Tabel 11. Capaian IK Laporan SPIP Yang Disusun Lingkup Setditjen PKRL Pada Triwulan I Tahun 2025	27
Tabel 12 Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Lingkup DJPKRL Pada Triwulan I Tahun 2025	29
Tabel 13 Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Setditjen PKRL Pada Triwulan I Tahun 2025	31
Tabel 14 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja DJPKRL Pada Triwulan I Tahun 2025.....	33
Tabel 15 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PKRL Pada Triwulan I Tahun 2025.....	35
Tabel 16 Capaian IK Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas LK DJPKRL Pada Triwulan I Tahun 2025	37

Tabel 17 Capaian IK Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Setditjen PKRL Pada Triwulan I Tahun 2025	38
Tabel 18 Capaian IK Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPKRL Pada Triwulan I Tahun 2025.....	42
Tabel 19 Capaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik Pada Triwulan I Tahun 2025	43
Tabel 20 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unit Kerja	44
Tabel 21 Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Djpkrl.....	47
Tabel 22 Capaian IK Presentase Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Lingkup DJPKRL Pada Triwulan I Tahun 2025.....	49
Tabel 23 Capaian IK Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri Dan Keputusan Menteri Di Bidang Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut Pada Triwulan I Tahun 2025.....	51
Tabel 24 Capaian IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPKRL Pada Triwulan I Tahun 2025	55
Tabel 25 Capaian IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal ASN Lingkup Setditjen PKRL Pada Triwulan I Tahun 2025	58
Tabel 26 Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada Sirup DJPKRL Pada Triwulan I Tahun 2025	60
Tabel 27 Capaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik DJPKRL Pada Triwulan I Tahun 2025	62
Tabel 28 Capaian IK Presentase Pelaksaaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut Pada Triwulan I Tahun 2025 .	65
Tabel 29 Capaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi Yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025	69
Tabel 30 Realisasi Anggaran Yang Mendukung Kinerja Setditjen PKRL Per Unit Kerja Di Lingkup Setditjen PKRL	70
Tabel 31 Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Dari Laporan Kinerja Setditjen PKRL Tahun 2024.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa pengelolaan kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun komponen pengelolaan kinerja meliputi:

- 1) Penjenjangan Kinerja;
- 2) Perencanaan Kinerja;
- 3) Pengukuran Kinerja;
- 4) Pelaporan Kinerja; dan
- 5) Evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sampai dengan level di bawahnya, termasuk Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Setditjen PKRL) turut dalam pengelolaan kinerja lingkup DJPKRL. Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen pengelolaan kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim (setiap triwulan) dan laporan kinerja tahunan. Laporan Kinerja Setditjen PKRL Triwulan 1 Tahun 2025 ini menjelaskan secara komprehensif tentang capaian kinerja organisasi Setditjen PKRL sampai dengan triwulan pertama tahun 2025. Laporan Kinerja ini memuat capaian, perbandingan, analisis keberhasilan, kendala, solusi, efisiensi, kegiatan pendukung serta rencana tindak lanjut masing - masing indikator kinerja Setditjen PKRL tahun 2025.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Triwulan I Tahun 2025.

1.3 ISU STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan sumber daya manusia berkualitas yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah dan dipantau secara berkala.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dituangkan tentang peran strategis Ditjen PKRL yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut serta menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.

Setditjen PKRL berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan DJPKRL guna mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB). Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 bahwa Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;

2. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
3. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
7. Koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
9. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; dan
10. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Susunan organisasi Setditjen PKRL terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam Pengelolaan Kelautan dan laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada tahun 205-2029, rencana kerja dan anggaran Tahun 2025, dan penetapan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Penetapan kinerja Tahun 2025 menggunakan penekanan pada tiga perspektif yang saling berimbang dan di“cascading” (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai). Dengan metode atau pendekatan BSC, telah dilakukan restrukturisasi SAKIP KKP dimulai dari level Renstra kementerian sampai dengan level *monitoring* dan pengukuran kinerja. Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan Setditjen PKRL Tahun 2025 yang tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025. Dokumen RKT 2025 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.

Tabel 1 Indikator dan Target Kinerja Setditjen PRKL Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	1.	Nilai PM SAKIP DJPKRL (Nilai)	88
		2.	Nilai PM SAKIP lingkup Setditjen PKRL (Nilai)	88
		3.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PKRL (Nilai)	92
		4.	Persentase realisasi anggaran lingkup Setditjen PKRL (%)	95
		5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup DJPKRL (Nilai)	81,5
		6.	Nilai maturitas struktur dan proses SPIP unit DJPKRL (Nilai)	3,5
		7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Setditjen PKRL (Dokumen)	4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup DJPKRL (Indeks)	87
		9.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Setditjen PKRL (Indeks)	87
		10.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPKRL (%)	85
		11.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Setditjen PKRL (%)	85
		12.	Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPKRL (%)	<0,5
		13.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Setditjen PKRL (%)	100
		14.	Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis DJPKRL (%)	81
		15.	Persentase pemenuhan dokumen pelayanan publik (%)	100
		16.	Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPKRL (%)	91
		17.	Persentase penyelenggaraan Pengarus Utamaan Gender (PUG) lingkup DJPKRL (%)	100
		18.	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)	100
		19.	Nilai pengawasan kearsipan internal DJPKRL (Nilai)	80
		20.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Setditjen PKRL	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		21.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPKRL (%)	76
		22.	Nilai keterbukaan informasi publik DJPKRL (Nilai)	91
		23.	Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut (%)	100
		24.	Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan (%)	100

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagai unit organisasi level dua yang melaksanakan tugas pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut juga mendukung kinerja mandatory lingkup KKP. Kinerja mandatory tahun 2025 antara lain

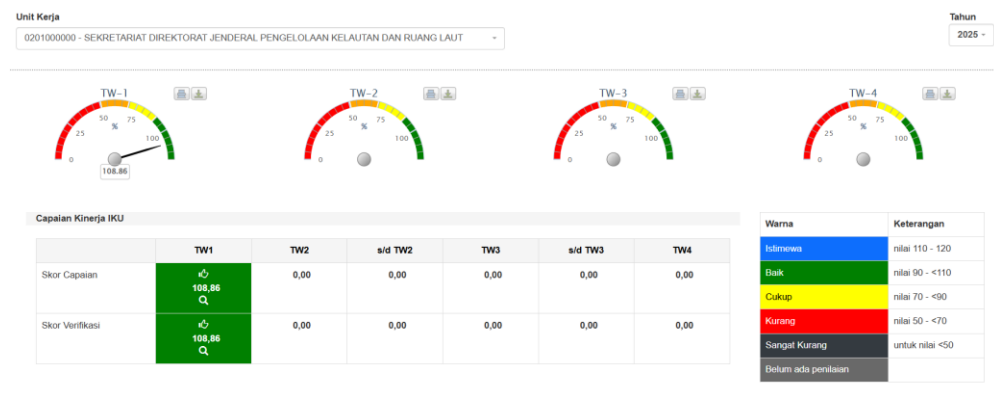
1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja
2. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK-RI
3. Nilai pembangunan integritas
4. Tingkat efektifitas pelaksanaan program prioritas/strategis
5. Nilai penilaian mandiri SAKIP
6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)
8. Nilai maturitas struktur dan proses SPIP
9. Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP
10. Indeks Profesionalitas ASN
11. Tingkat kepatuhan pengelolaan data
12. Nilai proposal inovasi pelayanan publik
13. Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri
14. Nilai pengawasan kearsipan internal
15. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP

Untuk mendukung kinerja pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Setditjen PKRL menetapkan indikator diluar mandatory yang ditetapkan oleh KKP yaitu:

1. Persentase realisasi anggaran lingkup Setditjen PKRL
2. Laporan SPIP yang disusun lingkup Setditjen PKRL
3. Presentase penyelenggaraan Pengarus Utamaan Gender (PUG) lingkup DJPKRL
4. Nilai keterbukaan informasi publik DJPKRL
5. Presentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut
6. Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Setditjen PKRL Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PKRL terdapat 24 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Setditjen PKRL. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen PKRL Triwulan I Tahun 2025 sebesar 108,86 (termasuk kriteria baik).



Sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id

Gambar 1 Nilai Capaian Kinerja Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Laut Triwulan I Tahun 2025

Secara rinci, capaian masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Setditjen PKRL Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Setditjen PKRL Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan I		
					Target	Capaian	% (Kinerjaku)
Terwujudnya Layanan	1.	Nilai PM SAKIP DJPKRL (Nilai)	Tahunan	88	-	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan I		
					Target	Capaian	% (Kinerjaku)
Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	2.	Nilai PM SAKIP lingkup Setditjen PKRL (Nilai)	Tahunan	88	-	-	-
	3.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PKRL (Nilai)	Semesteran	92	-	-	-
	4.	Persentase realisasi anggaran lingkup Setditjen PKRL (%)	Triwulanan	95	5	13,25	120
	5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup DJPKRL (Nilai)	Tahunan	81,5	-	-	-
	6.	Nilai maturitas struktur dan proses SPIP unit DJPKRL (Nilai)	Tahunan	3,5	-	-	-
	7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Setditjen PKRL (Dokumen)	Triwulanan	4	1	1	100
	8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup DJPKRL (Indeks)	Semesteran	87	-	-	-
	9.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Setditjen PKRL (Indeks)	Semesteran	87	-	-	-
	10.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPKRL (%)	Triwulanan	85	85	88,64	104,28
	11.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan	Triwulanan	85	85	85,71	100,84

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan I		
					Target	Capaian	% (Kinerjaku)
		kinerja Setditjen PKRL (%)					
	12.	Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPKRL (%)	Tahunan	<0,5	-	-	-
	13.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Setditjen PKRL (%)	Tahunan	100	-	-	-
	14.	Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis DJPKRL (%)	Tahunan	81	-	-	-
	15.	Persentase pemenuhan dokumen pelayanan publik (%)	Tahunan	100	-	-	-
	16.	Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPKRL (%)	Tahunan	91	-	-	-
	17.	Presentase penyelenggaraan Pengarus Utamaan Gender (PUG) lingkup DJPKRL (%)	Tahunan	100	-	-	-
	18.	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)	Semesteran	100	-	-	-
	19.	Nilai pengawasan kearsipan internal DJPKRL (Nilai)	Tahunan	80	-	-	-
	20.	Nilai pengawasan kearsipan internal ASN lingkup Setditjen PKRL	Tahunan	80	-	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan I		
					Target	Capaian	% (Kinerjaku)
	21.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPKRL (%)	Triwulanan	76	-	-	-
	22.	Nilai keterbukaan informasi publik DJPKRL (Nilai)	Tahunan	91	-	-	-
	23.	Persentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut (%)	Tahunan	100	-	-	-
	24.	Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan (%)	Tahunan	100	-	-	-

3.1 SK 1. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Dalam upaya mencapai Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PKRL, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja: 1) Nilai PM SAKIP DJPKRL; 2) Nilai PM SAKIP lingkup Setditjen PKRL; 3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PKRL; 4) Persentase realisasi anggaran lingkup Setditjen PKRL; 5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup DJPKRL; 6) Nilai maturitas struktur dan proses SPIP unit DJPKRL; 7) Laporan SPIP yang disusun lingkup Setditjen PKRL; 8) Indeks profesionalitas ASN lingkup DJPKRL; 9) Indeks profesionalitas ASN lingkup Setditjen PKRL; 10) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPKRL; 11) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Setditjen PKRL; 12) Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPKRL; 13) Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Setditjen PKRL; 14) Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis DJPKRL; 15)

Persentase pemenuhan dokumen pelayanan publik; 16) Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPKRL; 17) Presentase penyelenggaraan Pengarus Utamaan Gender (PUG) lingkup DJPKRL; 18) Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; 19) Nilai pengawasan kearsipan internal DJPKRL; 20) Nilai pengawasan kearsipan internal ASN lingkup Setditjen PKRL; 21) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPKRL; 22) Nilai keterbukaan informasi publik DJPKRL; 23) Presentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut; 24) Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan.

IK 1. Nilai PM SAKIP DJPKRL

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di DJPKRL setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 dan telah diperbaru melalui Permen RB 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang sudah dituangkan pada aplikasi kinerjaku pada menu Evaluasi > LKE).

Nilai PM SAKIP DJPKRL adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat III, Inspektorat Jenderal KKP. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 3 Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.

Predikat	Nilai	Interpretasi
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4 Capaian IK Nilai PM SAKIP DJPKRL Triwulan I Tahun 2025

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut					
IK – 1	Nilai PM SAKIP DJPKRL					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	88	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat Capaian pada Triwulan I Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024

Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan I dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahunnya dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPKRL dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPKRL.

D. Kegiatan Pendukung

1. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Rencana Aksi DJPKRL dan Setditjen PKRL Triwulan IV Tahun 2024
2. Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024
3. Finalisasi Dokumen Kinerja Lingkup DJPKRL Tahun 2025

4. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi DJPKRL Tahun 2025
5. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Manual IKU Level 1 Lingkup Ditjen PKRL tahun 2025
6. Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024 Direktorat dan UPT lingkup DJPKRL.
7. Penyusunan Teknokratik Renstra DJPRL 2025 – 2029
8. Penyusunan Manual IK Level 2 Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2025.

IK 2. Nilai PM SAKIP lingkup Setditjen PKRL

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di DJPKRL setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 dan telah diperbaru melalui Permen RB 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang sudah dituangkan pada aplikasi kinerjaku pada menu Evaluasi > LKE).

Nilai PM SAKIP DJPKRL adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat III, Inspektorat Jenderal KKP. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 5 Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.

Predikat	Nilai	Interpretasi
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6 Capaian IK Nilai PM SAKIP lingkup Setditjen PKRL pada Triwulan I Tahun 2025

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut					
IK – 2	Nilai PM SAKIP lingkup Setditjen PKRL					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	88	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat Capaian pada Triwulan I Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024

Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan I dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahunnya dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPKRL dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPKRL.

D. Kegiatan Pendukung

1. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Rencana Aksi DJPKRL dan Setditjen PKRL Triwulan IV Tahun 2024
2. Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024
3. Finalisasi Dokumen Kinerja Lingkup DJPKRL Tahun 2025

4. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi DJPKRL Tahun 2025
5. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Manual IKU Level 1 Lingkup Ditjen PKRL tahun 2025
6. Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024 Direktorat dan UPT lingkup DJPKRL.
7. Penyusunan Teknokratik Renstra DJPRL 2025 – 2029
8. Penyusunan Manual IKU Level 2 Lingkup Ditjen PKRL Tahun 2025.

IK 3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PKRL

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Formula Perhitungan:

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. Sedangkan, konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Tabel 7 Capaian IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PKRL pada Triwulan I Tahun 2025

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut					
IK – 3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PKRL					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	92	-

- A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2025
Tidak ada target triwulanan untuk Indikator Nilai Kinerja Anggaran Setditjen PKRL pada Triwulan I Tahun 2025 karena frekuensi pengukurannya tahunan.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024
Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran capaian pada adalah tahunan.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Kendalanya adalah
1. Anggaran masih diblokir sehingga mempengaruhi realisasi anggaran.
 2. Beberapa pengadaan yang bersumber dari anggaran PHLN masih menunggu persetujuan Menteri KKP.
 3. Adanya revisi KRO (Kumpulan Rincian Output).
- Solusi yang telah dilakukan adalah
1. Melakukan revisi DIPA dengan menghilangkan alokasi anggaran yang diblokir.
 2. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana diupayakan sesuai jadwal dan diselesaikan pada triwulan I tahun 2025.
 3. Melakukan revisi KRO (Kumpulan Rincian Output).
- D. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan I Tahun 2025 telah disampaikan Surat kepada Pimpinan Unit Kerja di lingkup DJPKRL perihal Pemuktahiran Rencana Penarikan Dana halaman DIPA III Triwulan I Tahun 2025 serta Pelaporan Target dan Capaian Output.

IK 4. Persentase Realisasi Anggaran lingkup Setditjen PKRL

Persentase Realisasi Anggaran adalah Persentase Capaian Realisasi Anggaran pada suatu Unit Kerja dibandingkan jumlah Pagu Anggaran yang diberikan.

3. Formula Perhitungan:

$$X = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Persentase Penyerapan Anggaran
RA = Jumlah Persentasi Pencapaian Realisasi Anggaran
PA = Jumlah Pagu Anggaran yang ditetapkan pada Unit Kerja

Tabel 8 Capaian IK Persentase Realisasi Anggaran lingkup Setditjen PKRL Triwulan I Tahun 2025

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut					
IK – 4	Persentase Realisasi Anggaran lingkup Setditjen PKRL					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
15,7	5	13,25	265 atau 120 (Kinerjaku)	-	95	13,94

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Anggaran Setditjen PKRL pada Triwulan I Tahun 2025 adalah Rp17.700.471.767 atau 13,25% dari pagu anggaran sebesar Rp133.563.570.000, berdasarkan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024

Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 (13,25%) lebih kecil dari capaian pada Triwulan I Tahun 2024 (15,7%) karena pada tahun 2025 terdapat tambahan Anggaran dari PHLN LAUTRA sehingga mengakibatkan pagu anggaran tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2024.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

1. Analisis Keberhasilan: Capaian indikator ini didukung dengan adanya percepatan penyerapan anggaran dengan melaksanakan

pembayaran belanja dengan metode langsung (LS). Selain itu juga dengan percepatan revolving uang persediaan (UP)..

2. Kendala:

- a. KRO yang akan direvisi
- b. Perjalanan pimpinan cenderung fluktuatif dan tidak terprediksi
- c. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah masih terkendala pada Pengajuan Pembayaran Revolving UP

3. Solusi yang telah dilakukan yaitu :

- a. Melakukan Revisi DIPA
- b. Mengoptimalkan pembayaran belanja dengan menggunakan metode pembayaran Langsung (LS).

D. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan pendukung diantaranya:

1. Lanjutan Pelaksanaan Reviu Cash Opname dan Stock Opname lingkup DJPKRL pada tanggal 2-3 Januari 2025
2. Pelaksanaan Reviu Cash Opname dan Stock Opname lingkup DJPKRL pada tanggal 6 Januari 2025
3. Finalisasi Reviu Cash Opname dan Stock Opname Ditjen PKRL TA 2024 pada tanggal 8 Januari 2025
4. Koordinasi Pemenuhan Dokumen Pertanggungjawaban Lautra pada tanggal 21 - 23 Januari 2025.
5. Koordinasi Pemenuhan Dokumen Pertanggungjawaban Lautra pada tanggal 30-31 Januari 2025.

IK 5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup DJPKRL

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2025 Level 1 (Eselon I) 81,50

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
2. Baik, apabila NKPA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKPA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKPA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKPA ≤ 50

Formula Perhitungan:

NKPA Unit Eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektivitas Satker	45
Efisiensi (25)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

a. Efektifitas

1. Capaian Indikator Kinerja Program

CIKP=

$$\left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKPi}{TIKPi} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

Keterangan:

CIKSS : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Kementerian/Lembaga
RIKSSi : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
TIKSSi : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
n : Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2. Nilai Efektifitas Satker

Nef Satker =

$$\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVROi}{TVROi} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

NEf Satker : Nilai Efektivitas Satker
RVROi : Realisasi Volume RO i
TVROi : Target Volume RO i
n : Jumlah RO seluruh Satker

b. Efisiensi

NE Satker = (40% X Penggunaan SBK) + (60% X Efisiensi SBK)

Formula Perhitungan NKA Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

$NKA\ UEI = (CIKP \times WCIKP) + (NEfsatker \times WNEfsatker) + (NESatker \times WNESatker)$

Keterangan:

NKA UEI : Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I
CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program
NEfsatker : Nilai Efektivitas Satker
NESatker : Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WNEfsatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker
WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 9 Capaian IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup DJPKRL pada Triwulan I Tahun 2025

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut					
IK – 5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup DJPKRL					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	81,5	-

- A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2025
IK ini tidak memiliki target dan capaian triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024
Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

1. Analisis Keberhasilan: capaian indikator ini didukung dengan komitmen setiap unit kerja dalam pelaksanaan kinerja anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, kerja sama antar masing-masing bagian menjadi faktor penting dalam pelaksanaan anggaran dan juga adanya pengawasan dari pihak KPPN dan Biro Keuangan KKP terkait target dari masing-masing indikator NKPA tersebut.
 2. Kendala: pada Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran yaitu indikator Deviasi Halaman III DIPA belum mencapai nilai maksimal. Hal ini dikarenakan masih adanya gap yang berasal dari ketidaksesuaian nilai antara rencana penarikan dana (RPD) dengan realisasi anggaran. Gap tersebut dikarenakan terdapat proses revisi blokir A pada triwulan I yang mengakibatkan penyerapan anggaran rendah sehingga terjadi Deviasi yg cukup tinggi.
 3. Solusi yang telah dilakukan: pemutakhiran Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA disesuaikan dengan penyerapan anggaran Triwulan I dan untuk Triwulan II.
- D. Kegiatan Pendukung
- Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pelaksanaan IK ini adalah koordinasi dengan unit kerja untuk melakukan upaya peningkatan nilai NKPA khususnya pada indikator yang bernilai rendah, melakukan pemantauan nilai NKPA secara berkala, dan menyampaikannya kepada unit kerja sebagai bahan evaluasi.

IK 6. Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP unit DJPKRL

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nilai akan disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN yang berisi sumber data dari Inspektorat Jenderal. Penilaian maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja Eselon I dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP, yaitu (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi (5) Pemantauan. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:

LEVEL MATURITAS		INTERVAL SKOR
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5	Optimum	Lebih dari 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

Formula Perhitungan:

- Hasil penilaian dikeluarkan oleh APIP.
- Mekanisme Penilaian Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja Eselon I terdiri atas:
 - Penilaian Mandiri (PM) oleh Unit Kerja Eselon I
 - Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP

Tabel 10 Capaian IK Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP unit DJPKRL pada Triwulan I Tahun 2025

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut				
IK – 6		Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP unit DJPKRL				
Tahun 2024		Tahun 2025				
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	3,5	-

- Capaian IK Triwulan I Tahun 2025
IK ini tidak memiliki target dan capaian triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan.
- Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024
Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan indikator ini
- Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan I Tahun 2025 telah dilakukan rapat dengan Biro Keuangan dan BMN mengenai pembahasan penetapan konteks manajemen risiko Kementerian berdasarkan rencana strategis,

persiapan penilaian Mandiri Maturitas Tahun 2025 pada tanggal 17 Maret 2025.

IK 7. Laporan SPIP yang disusun lingkup Setditjen PKRL

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL. Hal ini menjadi amanah sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Teknik Menghitung IK ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun. Laporan SPIP disusun secara triwulanan. Laporan SPIP yang disusun pada tahun 2024 adalah Laporan SPIP pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025.

Capaian IK SPIP disajikan pada tabel berikut:

Tabel 11. Capaian IK Laporan SPIP yang disusun lingkup Setditjen PKRL pada Triwulan I Tahun 2025

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut					
IK – 7	Laporan SPIP yang disusun lingkup Setditjen PKRL					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
1	1	1	100	0	4	25

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2025

Pada Triwulan I Tahun 2025 telah dihasilkan Laporan SPIP Tahun 2024 yang merupakan Capaian dari target IK ini pada Triwulan I Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024

Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 sama dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 karena telah dihasilkan 1 laporan SPIP pada waktu yang sama yakni Laporan SPIP Tahun 2023 yang disusun pada Triwulan I

Tahun 2024 dan Laporan SPIP Tahun 2024 yang disusun pada Triwulan I Tahun 2025.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan indikator ini didukung oleh koordinasi pemberitahuan pengumpulan data kepada satuan kerja dan ketua tim kerja di lingkup DJPKRL sebagai persiapan penilaian maturitas SPIP yang akan dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025.

D. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I Tahun 2025 telah dilakukan rapat dengan Biro Keuangan dan BMN mengenai pembahasan penetapan konteks manajemen risiko Kementerian berdasarkan rencana strategis, persiapan penilaian Mandiri Maturitas Tahun 2025 pada tanggal 17 Maret 2025.

IK 8. Indeks Profesionalitas ASN lingkup DJPKRL

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Formula Perhitungan:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i \\ = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$$W_{1j} * R_{1j} = \text{Bobot Indikator Kualifikasi ke-j} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j}$$

$$W_{2k} * R_{2k} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-k} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k}$$

$$W_{3l} * R_{3l} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-l} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l}$$

$$W_{4m} * R_{4m} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-m} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m}$$

Capaian IK Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 12 Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN lingkup DJPKRL pada Triwulan I Tahun 2025

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut				
IK – 8		Indeks Profesionalitas ASN lingkup DJPKRL				
Tahun 2024		Tahun 2025				
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	87	-

- A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2025
IK ini tidak memiliki target dan capaian triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran sehingga tidak terdapat Capaian pada Triwulan I Tahun 2025.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024
Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah semesteran.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan IK ini, hanya saja Aplikasi IP ASN belum dapat diakses karena masih dalam tahap pengembangan.
- D. Kegiatan Pendukung yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Kinerja ini adalah
 1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Kinerja Pegawai/SKP Tahun 2025 pada aplikasi e-Kinerja BKN lingkup Ditjen PKRL.
 2. Seleksi Calon Peserta Tugas Belajar Bidang Konservasi.
 3. Pemberkasan PPPK TA.2024 lingkup Ditjen PKRL.

4. Peremajaan dan Sinkronisasi Data melalui aplikasi SIASN dan e-kinerja BKN serta Verifikasi berkas Usul Kenaikan Pangkat Pegawai periode April 2025.
5. Pelantikan Jabatan Fungsional melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain.
6. Rapat pembahasan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
7. Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Biokrasi General Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
8. Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Biokrasi Tematik Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
9. Pemantauan kepatuhan Pelaporan LHKPN Tahun 2024 oleh WL LHKPN lingkup Direktorat Jenderal PKRL.
10. Pemantauan kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur melalui pelaporan Pajak SPT Tahunan 2024 oleh pegawai lingkup Direktorat Jenderal PKRL.
11. Penginputan Rencana Aksi, Realiasi dan Upload Bukti Dukung SKP dalam rangka Penilaian SKP Pegawai Triwulan I Tahun 2025 pada aplikasi e-Kinerja BKN lingkup Ditjen PKRL.

IK 9. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Setditjen PKRL

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Formula Perhitungan:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Capaian IK Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 13 Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN lingkup Setditjen PKRL pada Triwulan I Tahun 2025

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut					
IK – 9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Setditjen PKRL					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	87	-

- A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2025
IK ini tidak memiliki target dan capaian triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2025.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024

Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah semesteran.

- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan IK ini, hanya saja Aplikasi IP ASN belum dapat diakses karena masih dalam tahap pengembangan.
- D. Kegiatan Pendukung
1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Kinerja Pegawai/SKP Tahun 2025 pada aplikasi e-Kinerja BKN lingkup Ditjen PKRL.
 2. Seleksi Calon Peserta Tugas Belajar Bidang Konservasi.
 4. Pemberkasan PPPK TA.2024 lingkup Ditjen PKRL.
 5. Peremajaan dan Sinkronisasi Data melalui aplikasi SIASN dan e-kinerja BKN serta Verifikasi berkas Usul Kenaikan Pangkat Pegawai periode April 2025.
 6. Pelantikan Jabatan Fungsional melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain.
 7. Rapat pembahasan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
 8. Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Biokrasi General Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
 9. Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Biokrasi Tematik Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
 10. Pemantauan kepatuhan Pelaporan LHKPN Tahun 2024 oleh WL LHKPN lingkup Direktorat Jenderal PKRL.
 11. Pemantauan kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur melalui pelaporan Pajak SPT Tahunan 2024 oleh pegawai lingkup Direktorat Jenderal PKRL.
 12. Penginputan Rencana Aksi, Realiasi dan Upload Bukti Dukung SKP dalam rangka Penilaian SKP Pegawai Triwulan I Tahun 2025 pada aplikasi e-Kinerja BKN lingkup Ditjen PKRL.

IK 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPKRL

Definisi rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit DJPKRL sampai dengan waktu pengukuran.

Formula perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$$

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 14 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPKRL pada Triwulan I Tahun 2025

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut					
IK – 10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPKRL					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
94,61	85	88,64	104,28	-5.97	85	104,28

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2025

Capaian IK ini pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 88,64% yang telah melebihi target (85%). Capaian ini diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan inspektorat Jenderal KKP yang diterbitkan dengan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan yang berstatus tuntas pada Sekretariat Direktorat Jenderal PK. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti dengan status tuntas lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PK pada periode tersebut sebesar 88,64% (88 dari 78 rekomendasi telah ditindaklanjuti dan sisa 10 rekomendasi).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024

Capaian Kinerja Pada Triwulan I Tahun 2025 (88,64%) lebih kecil dari pada capaian Triwulan I Tahun 2024 (94,61%) karena lebih sedikit

rekomendasi pengawasan yang telah ditindaklanjuti. Adapun Temuan pada Triwulan I Tahun 2025 meliputi

1. Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Periode Triwulan III Tahun 2024 Lingkup Ditjen PKRL
 2. Hasil Reviu Pagu Definitif Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) TA 2025 Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
 3. Hasil Pemantauan Implementasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Triwulan III Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
 4. Hasil Evaluasi Efektivitas Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Tahun 2023 Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
 5. Evaluasi Dukungan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem TA 2023 dan 2024 pada Satker lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
 6. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) Triwulan IV Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
 7. Hasil Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja lingkup Direktorat Jenderal PKRL Tahun 2024.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
- Keberhasilan indikator ini didukung oleh komitmen penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP, melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab kegiatan agar rekomendasi dituntaskan tepat waktu, melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal KKP untuk penyamaan persepsi dokumen yang harus disiapkan.
- D. Kegiatan Pendukung
1. Pembahasan Hasil Audit Dokumen Pertanggungjawaban Proyek Lautra pada tanggal 6 Februari 2025
 2. Rapat Koordinasi Pembahasan Progress TL LHP BPK dan APIP pada DKP Prov dan Kab lingkup DJPKRL pada 5 Maret 2025
 3. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut atas LHA Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA 2024 dan 2025 pada Satker Lingkup DJPKRL pada tanggal 12 Maret 2025
 4. Identifikasi Penetapan Akun Signifikan PIPK pada Entitas Akuntansi lingkup DJPKRL Tahun 2025 pada tanggal 11 Maret 2025

5. Entry Meeting Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Itjen TW 1 2025 pada tanggal 18 Maret 2025
6. Koordinasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK Pemenuhan Data Persediaan & BMN 2024 pada tanggal 26 Maret 2025.

IK 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PKRL

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Setditjen PKRL sampai dengan waktu pengukuran.

Formula perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$$

Berikut capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PKRL pada Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 15 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PKRL pada Triwulan I Tahun 2025

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut					
IK – 11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PKRL					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
96,23	85	85,71	100,84	-10,52	85	100,84

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2025

Capaian IK ini pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 85,71% yang telah melebihi target (85%). Capaian ini diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan inspektorat Jenderal KKP yang diterbitkan dengan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan yang berstatus tuntas pada Sekretariat Direktorat Jenderal PK. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti dengan status tuntas lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PK pada periode tersebut sebesar 85,71% (12 dari 14 rekomendasi telah ditindaklanjuti).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024

Capaian Kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 (85,71%) lebih kecil dari pada capaian Triwulan I Tahun 2024 (96,23%) karena lebih sedikit rekomendasi pengawasan yang telah ditindaklanjuti. Temuan pada Triwulan I Tahun 2025 meliputi Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Periode Triwulan III Tahun 2024 Lingkup Ditjen PKRL.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan indikator ini didukung oleh komitmen penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP, melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab kegiatan agar rekomendasi dituntaskan tepat waktu, melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal KKP untuk penyamaan persepsi dokumen yang harus disiapkan.

D. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I Tahun 2025 telah dilakukan:

1. Rapat Koordinasi Pembahasan Progress TL LHP BPK dan APIP pada DKP Prov dan Kab lingkup DJPKRL
2. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut atas LHA Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA 2024 dan 2025 pada Satker Lingkup DJPKRL
3. Identifikasi Penetapan Akun Signifikan PIPK pada Entitas Akuntansi lingkup DJPKRL Tahun 2025
4. Entry Meeting Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Itjen TW 1 2025
5. Koordinasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK Pemenuhan Data Persediaan & BMN 2024.

IK 12. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPKRL

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPKRL merupakan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Eselon I tahun 2024.

Formula perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada LK Unit Eselon I Tahun 2024}}{\text{Jumlah realisasi anggaran Unit Eselon I Tahun 2024}} \times 100\%$$

Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL Pada Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada Tabel 19.

Tabel 16 Capaian IK Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPKRL pada Triwulan I Tahun 2025

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut					
IK – 12	Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPKRL					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	<0,5	-

- A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2025
Tidak ada capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 karena IK ini dihitung secara tahunan.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024
Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2024 karena IK ini dihitung secara tahunan.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 1. Analisis Keberhasilan: Keberhasilan capaian ini didukung unit kerja dengan menjalankan kegiatan dan administrasi kegiatan sesuai dengan ketentuan undang- undang. Selain itu, koordinasi dengan seluruh Penanggung Jawab Kegiatan lingkup DJPKRL terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi TL BPK dan telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut di Triwulan berikutnya
 2. Kendala dalam pelaksanaan IK ini adalah masih ada temuan yang belum ditindaklanjuti
 3. Solusinya adalah dengan mengadakan rapat dan menindaklanjuti temuan BPK secara berkala.
- D. Kegiatan Pendukung
Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 adalah

1. Rapat Koordinasi Pembahasan Progress TL LHP BPK dan APIP pada DKP Prov dan Kab lingkup DJPKRL
2. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut atas LHA Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA 2024 dan 2025 pada Satker Lingkup DJPKRL
3. Identifikasi Penetapan Akun Signifikan PIPK pada Entitas Akuntansi lingkup DJPKRL Tahun 2025
4. Entry Meeting Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Itjen TW 1 2025
5. Koordinasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK Pemenuhan Data Persediaan & BMN 2024.

IK 13. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Setditjen PKRL

Temuan LHP BPK Setditjen PKRL yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Setditjen PKRL Tahun 2024.

Formula Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Setditjen PKRL yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Setditjen PKRL}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

Contoh:

Target = 100, Tidak dilakukan audit oleh BPK, maka yang dituliskan capaian pada kinerjaku adalah 100

Tabel 17 Capaian IK Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Setditjen PKRL pada Triwulan I Tahun 2025

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut					
IK – 13	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Setditjen PKRL					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	100	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2025

Tidak ada capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 karena IK ini dihitung secara tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024

Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2024 karena IK ini dihitung secara tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

1. Analisis Keberhasilan: Keberhasilan capaian ini didukung unit kerja dengan menjalankan kegiatan dan administrasi kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, koordinasi dengan seluruh Penanggung Jawab Kegiatan lingkup DJPKRL terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi TL BPK dan telah dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut di Triwulan berikutnya
2. Kendala dalam pelaksanaan IK ini adalah masih ada temuan yang belum ditindaklanjuti
3. Solusinya adalah dengan mengadakan rapat dan menindaklanjuti temuan BPK secara berkala.

D. Kegiatan Pendukung

1. Rapat Koordinasi Pembahasan Progress TL LHP BPK dan APIP pada DKP Prov dan Kab lingkup DJPKRL
2. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut atas LHA Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA 2024 dan 2025 pada Satker Lingkup DJPKRL
3. Identifikasi Penetapan Akun Signifikan PIPK pada Entitas Akuntansi lingkup DJPKRL Tahun 2025
4. Entry Meeting Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Itjen TW 1 2025
5. Koordinasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK Pemenuhan Data Persediaan & BMN 2024.

IK 14. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPKRL

Rencana Kerja Pemerintah mencakup 7 Prioritas Nasional, yaitu: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan (7) Meningkatkan Stabilitas Polhukhanmak dan Transformasi Pelayanan

Publik. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut berkontribusi pada Prioritas Nasional 1, 2, 4, dan 6.

Tantangan pelaksanaan kegiatan prioritas saat ini adalah memastikan intervensi pemerintah/belanja pemerintah memberikan manfaat bagi pembangunan *Delivered not just sent* dan bagaimana hasil pemantauan ini memberikan input terhadap rencana pembangunan. Dalam hal ini diperlukan upaya monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk:

1. Memastikan rencana dijalankan dengan baik dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan
2. Memastikan/mengawal pencapaian sasaran pembangunan
3. Mengawal pelaksanaan intervensi pemerintah dalam kerangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
4. Hasil monitoring (pemantauan), pengendalian, dan evaluasi terinternalisasi dalam rencana pembangunan.

Sebagian besar kegiatan prioritas di DJPKRL meliputi Bantuan Pemerintah. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal 18, bahwa Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan selama 2 (dua) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 1 (satu) tahun berikutnya. Monitoring dan Evaluasi tersebut dilaksanakan paling sedikit terhadap:

1. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
3. pemanfaatan Bantuan Pemerintah; dan
4. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah.

Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPKRL merupakan suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; mendukung pencapaian prioritas nasional; merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.

Formula Perhitungan:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Keterangan:

- a. PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target
- b. IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah
- c. AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan.

Secara umum, terdapat 13 kelompok Bantuan Pemerintah lingkup DJPKRL tahun anggaran 2024 yang meliputi

- 1) KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi) ditargetkan diberikan kepada 20 Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi
- 2) Wisata Bahari & BMKT ditargetkan di 10 Kawasan
- 3) Pengelolaan Biofarmakologi ditargetkan sebanyak 2 Kawasan
- 4) Rehabilitasi Mangrove memiliki target seluas di 100 Hektare
- 5) PRPEP (Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir) memiliki target sebanyak 4 Kawasan
- 6) Pengelolaan Sampah (Desa Pesisir Bersih) ditargetkan di 15 Kawasan
- 7) Penanaman Vegetasi Pantai memiliki target seluas di 10 Hektare.
- 8) PKPT (Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh) ditargetkan di 2 Kawasan
- 9) Dermaga Apung/ Tambat Labuh ditargetkan sebanyak 2 Unit
- 10) Sarana/Prasarana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari Bantuan Ekonomi Produktif sebanyak 55 paket dan Bantuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) 1 paket.
- 11) Sarana / Prasarana Pergaraman dengan target 1 Gudang Garam Nasional, 2 unit Washing Plant, 75 hektare Integrasi Lahan Garam, 2 unit Rumah Garam, 25 unit Gudang Garam Rakyat.
- 12) Pengolahan Produk Turunan Mangrove ditarget pada 4 Lokasi.
- 13) Sarana/Prasana Pengembangan Kawasan Karbon Biru di 1 Kawasan.

Capaian dan perkembangan IK ini sebagai berikut

Tabel 18 Capaian IK Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPKRL pada Triwulan I Tahun 2025

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut					
IK – 14	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis DJPKRL					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	81	-

- A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2025
Pengukuran capaian dilakukan tahunan dan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024
Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran capaian pada Tahun 2025 adalah tahunan.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan IK ini.
- D. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan I Tahun 2025 telah dilakukan
 1. Rapat Pemantauan Bantuan Pemerintah di Lingkup DJPKRL Tahun Anggaran 2024; dan
 2. Rapat Asistensi Penginputan pada Satu Data KKP.

IK 15. Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk serta pihak internal atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Upaya yang dilakukan untuk Pelayanan Publik:

- a. Pengumpulan/Inventaris bahan pelayanan publik lingkup Ditjen PRL
- b. Membahas/menelaah/mengevaluasi dokumen pelayanan publik
- c. Penyiapan/penyusunan bahan/konsep/dokumen pelayanan publik yang diselesaikan dengan ketentuan dalam kurun waktu 1 tahun sebagai

capaian Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang diselesaikan sesuai ketentuan

Dokumen Pelayanan Publik adalah dokumen yang terkait dengan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dokumen Pelayanan Publik meliputi:

- a. Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- b. Laporan Tata Laksana Perizinan

Formula Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah dokumen pelayanan publik yang disusun}}{\text{Jumlah dokumen pelayanan publik yang ditentukan}} \times 100\%$$

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan I Tahun 2025

Tabel 19 Capaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik pada Triwulan I Tahun 2025

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut					
IK – 15	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	100	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2025

Pengukuran capaian dilakukan tahunan sehingga belum ada capaian pada Triwulan I Tahun 2025 dan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025. Namun, pada Triwulan I Tahun 2025 telah dilaksanakan

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL

a. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Terhadap Unit Kerja yang diusulkan kepada Tim Penilai Nasional Tahun 2025 pada BPSPL Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Secara *Online* (Daring) oleh Inspektorat Jenderal melalui Surat Nomor: B.195/ITJ.5/HP.550/III/2025 tanggal 13 Maret 2025 dengan hasil bahwa BPSPL Makassar memenuhi syarat untuk memperoleh predikat Unit Kerja menuju WBK dengan total nilai Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil adalah 83,28.

- b. Penanganan Pengaduan
pada Triwulan I Tahun 2025 terdapat 9 (sembilan) pengaduan masyarakat yang masuk dan telah di input melalui saluran pengaduan LAPOR periode Januari-Februari 2025 dan sudah ditindaklanjuti dengan tuntas.
- c. Pengendalian Gratifikasi
Telah dilakukan penerbitan Surat Edaran B.370/DJPKRL/TU.210/III/2025 tentang Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tanggal 10 Maret 2025.
- d. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
SKM di lingkungan DJPKRL dilaksanakan setiap Triwulan, dengan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat pada masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan Publik lingkup Ditjen PKRL periode Triwulan I Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 20 Indeks Kepuasan Masyarakat per Unit Kerja

No	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Jumlah Responden	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu IKM
1	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	4	85.42	B (baik)
2	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1	100.00	A (Sangat Baik)
3	Direktorat Jasa Kelautan	2	100.00	A (Sangat Baik)
4	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	11	96.72	A (Sangat Baik)
5	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Laut (BPSPL) Padang	46	96.62	A (Sangat Baik)
6	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Laut (BPSPL) Denpasar	24	91.20	A (Sangat Baik)
7	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Laut (BPSPL) Pontianak	116	96.26	A (Sangat Baik)
8	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Laut (BPSPL) Makassar	47	95.63	A (Sangat Baik)
9	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	33	94.19	A (Sangat Baik)

No	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Jumlah Responden	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu IKM
10	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru	11	93.43	A (Sangat Baik)
11	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Laut (LPSPL) Serang	33	96.72	A (Sangat Baik)
12	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Laut (LPSPL) Sorong	39	98.22	A (Sangat Baik)
	DJPKRL	367	95.80	A (Sangat Baik)

e. Penyelenggaraan Penilaian Pelaksana Pelayanan Publik Teladan

Penilaian ini dilakukan terhadap pelaksana pelayanan publik teladan di lingkungan DJPKRL pada Tahun 2024. Sesuai dengan Berita Acara Nomor: B.585/DJPKRL.1/TU.210/II/2025 dengan hasil yang termasuk pelayanan publik teladan adalah Melodi Virginia dari BPSPL Padang, Despriyanto Supriady dari BPSPL Pontianak, dan Ahmad Rifqy Ramadhan dari LPSPL Sorong.

2. Tata Laksana Perizinan di Lingkungan DJPKRL

a. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada Triwulan I Tahun 2024, yaitu:

- 1) Jumlah konsultasi perizinan sebanyak 443.
- 2) Jumlah penerimaan dokumen perizinan sebanyak 0.
- 3) Jumlah penyerahan dokumen perizinan sebanyak 1.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024

Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran capaian pada Tahun 2025 adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

1. Analisis Keberhasilan: Capaian kinerja didukung oleh beberapa faktor, antara lain: (a) Komitmen pimpinan tertinggi untuk menciptakan terobosan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, (b) Adanya peran serta/partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam penyelenggaraan

pelayanan publik, serta (c) Tersedianya data dan informasi yang menunjang pemenuhan dokumen pelayanan publik.

2. Kendala: Faktor hambatan atau masalah capaian kinerja Triwulan 1 Tahun 2025 tidak ditemukan karena pemenuhan dokumen pelayanan publik akan diselesaikan pada Triwulan IV Tahun 2025.
3. Solusi: Dalam rangka mengantisipasi faktor hambatan atau masalah adalah dengan melakukan koordinasi bersama para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan mengupayakan ketersediaan data dan informasi yang menunjang pemenuhan dokumen pelayanan publik yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

D. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan I Tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa kegiatan dalam mendukung IK ini yakni

1. Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Publik DJPKRL di Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) KKP Triwulan IV Tahun 2024 pada tanggal 7 Januari 2025.
2. Rapat Koordinasi Tim Penilai Pelaksana Pelayanan Publik Teladan Di Lingkungan DJPKRL
3. Rapat Hasil Penilaian Pelaksana Pelayanan Publik Teladan Lingkup Ditjen PKRL dengan hasil penilaian Tim Penilai Pelaksana Pelayanan Publik Teladan di Lingkungan DJPKRL terhadap 12 (dua belas) calon penerima penghargaan Pelaksana Pelayanan Publik Teladan.

IK 16. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPKRL

Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional.

Data diambil dari pengisian kuesioner secara sampling, yang diisi oleh petugas Pengelola Data kelautan dan perikanan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah pelaku usaha yang telah teregister pada tahun sebelumnya.

Untuk menentukan parameter termasuk kedalam kategori tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh terdapat 3 Variabel Perhitungan, yaitu:

1. Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi (X1), Bobot Nilai 30%.
2. Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi (X2), Bobot Nilai 40%.
3. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (X3), Bobot Nilai 30%.

Formula Perhitungan: **Persentase TKPD: X1 + X2 + X3**

Adapun kriteria penilaiannya adalah :

Nilai TKPD 0 % - 25,9 % (tidak patuh)

Nilai TKPD 26 % - 50,9 % (cukup patuh)

Nilai TKPD 51 % - 75,9 % (patuh)

Nilai TKPD 76 % - 100 % (sangat patuh)

Rumus Variabel Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (X1):

$$\sum KUSUKA = \left(\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha KP yang telah Valid, Terdaftar, Termutakhirkan}}{\text{Total Target}} \right) \times 100$$

Rumus Variabel Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi (X2):

$$X = \left(\frac{\text{Realisasi jumlah sampling yang divalidasi}}{\text{Jumlah data sampling produksi garam yang diinput}} \right)$$

Rumus Variabel Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (X3)

$$\text{Nilai per eselon 1} = \left(\frac{\text{jumlah rencana aksi yang diselesaikan}}{\text{total kegiatan berdasarkan rencana aksi}} \right) \times 100$$

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan I Tahun 2025

Tabel 21 Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPKRL

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut					
IK – 16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPKRL					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	91	-

- A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2025
Tidak ada capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 karena IK ini dihitung secara tahunan. Namun, sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 telah dilaksanakan Validasi KUSUKA, data produksi garam tahun 2024, dan IGT DJPKRL.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024
Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran capaian pada Tahun 2025 adalah tahunan.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan IK ini.
- D. Kegiatan Pendukung
1. User Acceptance Test (UAT) Modul Produksi dan Valnas Lingkup DJPKRL tanggal 7 Januari 2025
 2. Sosialisasi Portal Data KKP Modul Kusuka tanggal 15 - 17 Januari 2025
 3. Penyusunan Metadata dan Target Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lingkup DJPKRL 30-31 Jan 2025
 4. Rapat Koordinasi Pendataan Kusuka pada tanggal 5 Maret 2025
 5. Asistensi Pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lingkup DJPKRL pada Portal Data KKP Modul Satu Peta 12 Maret 2025.
 6. Validasi KUSUKA petambak garam dari 12 Kabupaten/Kota di 6 Provinsi.
 7. Validasi produksi garam tahun 2024 dengan melibatkan BPS, Direktorat Jasa Kelautan, Sekretariat DJPKRL, dan Validator dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD/Dinas Provinsi/Kab/Kota). Berdasarkan hasil validasi, Produksi Garam Nasional Tahun 2024 adalah 2.043.935.658 kg yang berasal dari produksi garam rakyat sebesar 1.716.559.008 kg dan produksi garam perusahaan (PT. Garam, PT. Cheetam Flores Indonesia, PT. Timor Livestock Lestari, PT. Tjakrawala Timur Sentosa, PT. Ainul Hayat Sejahtera, PT. Garam Terang Indonesia, dan PT. Nagata Rai Hawu Industri) sebesar 327.376.650 kg.
 8. Validasi data petambak garam, luas lahan, produksi garam telah dilakukan pada 69 Kab/Kota di 13 Provinsi, dengan 12 kabupaten diantaranya merupakan lokasi penghasil garam diluar daftar sampel yang telah ditetapkan.

IK 17. Presentase Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) lingkup DJPKRL

Narasi.

Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan upaya pelaksanaan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Ruang lingkup penyelenggaraan PUG DJPKRL meliputi:

1. Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) PUG DJPKRL
2. Pengintegrasian perspektif gender dalam dokumen Renstra DJPKRL/Juknis/NSPK lainnya
3. Peningkatan kapasitas PUG
4. Penyusunan Gender Action Budget (GAB)
5. Penyediaan Data terpilah
6. Evaluasi penyelenggaraan PUG
7. Pelaporan pelaksanaan PUG DJPKRL.

Formula Perhitungan:

$$\text{Persentase PUG} = \left(\frac{\text{jumlah rencana aksi yang diselesaikan}}{\text{total rencana aksi}} \right) \times 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja Presentase Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) lingkup DJPKRL pada Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada Tabel 24.

Tabel 22 Capaian IK Presentase Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) lingkup DJPKRL pada Triwulan I Tahun 2025

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut					
IK – 17	Presentase Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) lingkup DJPKRL					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	100	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target dan capaian triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2025. Namun, sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 telah diselesaikan rencana aksi peningkatan kapasitas PUG yang dilaksanakan melalui Lokakarya Bimbingan Teknis

(Bimtek) Kelompok Kerja PUG di Provinsi Kepulauan Riau dan Papua Barat.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024

Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2024.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan IK ini.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 meliputi:

1. Lokakarya Bimbingan Teknis (Bimtek) Kelompok Kerja PUG di Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 7-9 Januari 2025
2. Lokakarya Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Pokja PUG di Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat 14-16 Januari 2025.



Gambar 2 Lokakarya Bimbingan Teknis (Bimtek) Kelompok Kerja PUG di Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

IK 18. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri) hingga 31 Desember 2025, dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Formula Perhitungan:

$$\text{Persentase Penyelesaian Progsun Permen} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Kepmen (Unit Organisas Es1

Keterangan:

a = Jumlah R. Permen KP dan R. Kepmen KP yang diselesaikan sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

b = Jumlah R. Permen KP dan R. Kepmen KP yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan I Tahun 2025

Tabel 23 Capaian IK Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada Triwulan I Tahun 2025

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut					
IK – 18	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	100	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target dan capaian triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2025. Namun, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2024, tercantum bahwa Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terdiri atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri dan 2 (dua) Rancangan Keputusan Menteri, yang meliputi:

1. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan tentang Desa Pesisir Bersih;
2. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari;
3. Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Kawasan Konservasi; dan
4. Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Status Perlindungan Jenis Ikan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024

Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah semesteran.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

1. Melakukan pembahasan rancangan peraturan menteri dan keputusan menteri secara intensif.
2. Melakukan koordinasi dengan K/L terkait, pemangku kepentingan dalam percepatan penyusunan rancangan peraturan menteri dan keputusan menteri

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu:

1. Pembahasan rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang:

- a. Penetapan Kawasan Konservasi di Provinsi DIY dan Provinsi Bali;
 - b. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
 - c. Status Perlindungan Jenis Ikan.
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Utara Papua pada tanggal 13 Januari 2025 di Hotel Luminor Pacenongan Jakarta Pusat;
 3. Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cendrawasih pada tanggal 14 Januari 2025 di Hotel Luminor Pacenongan Jakarta Pusat;
 4. Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional pada tanggal 21 Januari 2025 di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
 5. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 Januari - 1 Februari 2025 di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
 6. Rapat Dengar Pendapat terkait Aspek Regulasi Tata Ruang Wilayah serta Implementasi pada tanggal 26 Februari 2025 di Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI;
 7. Pendampingan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI pada tanggal 27 Februari 2025 di Gedung Nusantara Jakarta;
 8. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional pada tanggal 11 Maret 2025 di Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
 9. Melaksanakan Peninjauan Hak Atas Tanah di Perairan Laut pada tanggal 13 Maret 2025 di Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

IK 19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPKRL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang mampu mendukung program reformasi birokrasi maka perlu melakukan upaya peningkatan kualitas pengelolaan persuratan dan kearsipan meliputi kewajiban

Implementasi Tata Naskah Dinas, Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip serta Sistem Keamanan dan Hak Akses sesuai ketentuan.

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim

pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
 - a. penciptaan arsip (25%),
 - b. penggunaan arsip (25%),
 - c. pemeliharaan arsip (25%)
 - d. penyusutan arsip (25%)
2. Sumber daya kearsipan (bobot 50%)
 - a. sumber daya manusia kearsipan (50%),
 - b. prasarana dan sarana (50%).

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan I Tahun 2025

Tabel 24 Capaian IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPKRL pada Triwulan I Tahun 2025

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut				
IK – 19		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPKRL				
Tahun 2024		Tahun 2025				
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	80	-

- A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2025
IK ini tidak memiliki target dan capaian triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2025.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024
Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
 1. Analisis Keberhasilan: Keberhasilan capaian ini didukung dengan adanya ASN yang secara fungsional menangani kearsipan dan pada

penciptaan naskah dinas seluruh Satuan Kerja sudah sesuai tata naskah dinas.

2. Kendalanya pada Satuan Kerja belum adanya ASN secara fungsional menangani kearsipan dan terdapat pada pemantauan penciptaan arsip tahun 2024 teridentifikasi bahwa belum semua satuan kerja menggunakan format tata naskah dinas sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP.
3. Solusi yang diusulkan adalah Unit Kearsipan 2 (Ditjen PKRL) menyampaikan pemberitahuan dan membuat contoh format tata naskah dinas sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP kepada seluruh unit kerja di lingkungan DJPKRL.

D. Kegiatan Pendukung

Dalam rangka mendukung IK ini pada Triwulan I Tahun 2025, telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembahasan Pengelolaan Kearsipan Lingkup DJPKRL Tahun 2025;
2. Rapat Koordinasi Persuratan dan Kearsipan;
3. Pemindahan Arsip dari Record Center DJPKRL di Petojo ke Record Center DJPKRL di Kwitang;
4. Pengajuan Daftar Usul Musnah Arsip DJPKRL kepada Biro Umum dan PBJ selaku Unit Kearsipan 1
5. Kegiatan Upload Arsip DJPKRL pada Aplikasi SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional).

IK 20. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal ASN lingkup Setditjen PKRL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang mampu mendukung program reformasi birokrasi maka perlu melakukan upaya peningkatan kualitas pengelolaan persuratan dan kearsipan meliputi kewajiban Implementasi Tata Naskah Dinas, Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip serta Sistem Keamanan dan Hak Akses sesuai ketentuan.

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal
Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:
 - a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
3. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif
Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
4. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal
Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
 - a. penciptaan arsip (25%),
 - b. penggunaan arsip (25%),
 - c. pemeliharaan arsip (25%)
 - d. penyusutan arsip (25%)
2. Sumber daya kearsipan (bobot 50%)
 - a. sumber daya manusia kearsipan (50%),
 - b. prasarana dan sarana (50%).

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan I Tahun 2025

Tabel 25 Capaian IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal ASN lingkup Setditjen PKRL pada Triwulan I Tahun 2025

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut					
IK – 20	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal ASN lingkup Setditjen PKRL					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	80	-

- A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2025
IK ini tidak memiliki target dan capaian triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2025.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024
Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
 1. Analisis Keberhasilan: Keberhasilan capaian ini didukung dengan adanya ASN yang secara fungsional menangani kearsipan dan pada penciptaan naskah dinas seluruh Satuan Kerja sudah sesuai tata naskah dinas.

2. Kendalanya pada Satuan Kerja belum adanya ASN secara fungsional menangani kearsipan dan terdapat pada pemantauan penciptaan arsip tahun 2024 teridentifikasi bahwa belum semua satuan kerja menggunakan format tata naskah dinas sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP.
3. Solusi yang diusulkan adalah Unit Kearsipan 2 (Ditjen PKRL) menyampaikan pemberitahuan dan membuat contoh format tata naskah dinas sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP kepada seluruh unit kerja di lingkungan DJPKRL.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan I Tahun 2025

1. Pembahasan Pengelolaan Kearsipan Lingkup DJPKRL Tahun 2025;
2. Rapat Koordinasi Persuratan dan Kearsipan;
3. Pemindahan Arsip dari Record Center DJPKRL di Petojo ke Record Center DJPKRL di Kwitang;
4. Pengajuan Daftar Usul Musnah Arsip DJPKRL kepada Biro Umum dan PBJ selaku Unit Kearsipan 1
5. Kegiatan Upload Arsip DJPKRL pada Aplikasi SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional).

IK 21. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPKRL

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan

suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula perhitungan

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Tabel 26 Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPKRL pada Triwulan I Tahun 2025

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut					
IK – 21	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPKRL					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	76	100	131,57 atau 120 (kinerjaku)	-	76	131,57

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2025

Capaian IK pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 100 dari target 76. Capaian tersebut diperoleh dari nilai rata-rata persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP seluruh satker lingkup DJPKRL (9 Satker).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024

Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2025.

- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Pada Triwulan 1 seluruh pengelola aplikasi di masing-masing Satker telah mengumumkan RUP sesuai dengan pagu pengadaan pada aplikasi SiRUP, sehingga dapat memperoleh nilai yang optimal
- D. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan I Tahun 2025 telah dilaksanakan Rapat validasi Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025 Indikator Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada 20 Maret 2025, dengan peserta seluruh perwakilan Sekretariat Ditjen/Inspektorat/Badan.

IK 22. Nilai Keterbukaan Informasi Publik DJPKRL

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Adapun penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023.

Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu:

- a. Mengumumkan informasi publik
- b. Menyediakan informasi publik
- c. Sarana dan Prasarana
- d. Kelembagaan
- e. Digitalisasi.

Formula perhitungan

- 1) Monev Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui pengisian SAQ (Self Assesment Questionnaire) terbagi dalam 5 komponen indikator

(mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan digitalisasi).

- 2) SAQ disediakan oleh Biro Humas Kerja Sama dan Luar Negeri yang mengacu pada format kuesioner Komisi Informasi Pusat.
- 3) Penilaian keterbukaan informasi publik dilakukan oleh tim penilai internal KKP.
- 4) Hasil penilaian keterbukaan informasi publik merupakan hasil dari kumulatif penilaian dengan sistem pembobotan yang terdiri atas pengisian SAQ sebanyak 80 % dan presentasi sebanyak 20 %.
- 5) Nilai dan predikat atas hasil penilaian keterbukaan informasi publik yang diperoleh dari tim penilai internal KKP berupa:

No	Predikat	Interval Sektor
1	Informatif	90 – 100
2	Menuju Informatif	80 – 89,9
3	Cukup Informatif	60 – 79,9
4	Kurang Informatif	40 – 59,9

Berikut capaian dan perkembangan IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik DJPKRL

Tabel 27 Capaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik DJPKRL pada Triwulan I Tahun 2025

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut				
IK – 22		Nilai Keterbukaan Informasi Publik DJPKRL				
Tahun 2024		Tahun 2025				
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	91	-

- A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2025
Capaian IK ini diukur secara tahunan, sehingga tidak terdapat target maupun capaian pada Triwulan I Tahun 2025.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024
Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Faktor keberhasilan dalam pelaksanaan IK ini yaitu tercapainya predikat informatif dengan nilai minimal 91 oleh tim penilai internal KKP melalui hasil dari kumulatif penilaian dengan sistem pembobotan yang terdiri atas pengisian SAQ sebanyak 80% dan presentasi sebanyak 20%.

D. Kegiatan Pendukung

1. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 2025
2. Pemutakhiran konten website PPID
3. Pemutakhiran konten website DJPKRL
4. Publikasi informasi melalui media sosial dan website DJPKRL
5. Pelaksanaan layanan informasi publik
6. Penandatanganan komitmen bersama Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan KKP oleh Sesditjen PKRL.

IK 23. Presentase Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Kerja Sama adalah kegiatan yang dilakukan oleh KKP dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja KKP. Pelaksanaan kerja sama di lingkungan KKP berpedoman pada e.Perman KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- 1) Mengutamakan kepentingan nasional;
- 2) Kejelasan tujuan dan hasil;
- 3) Kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
- 4) Saling menghargai dan menguntungkan;
- 5) Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat;
- 6) Tidak menimbulkan ketergantungan;
- 7) Terencana dan berkelanjutan;
- 8) Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- 9) Berbasis indikator, kinerja, efektif dan efisien; dan
- 10) Bersifat kelembagaan.

Pelaksanaan kerjasama bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut meliputi kerjasama nasional dan internasional. Kerja Sama nasional meliputi kerja sama yang dilakukan DJPKRL dengan Kementerian dan lembaga pemerintah non Kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga non pemerintah. Kerja sama internasional meliputi kerja sama bilateral, regional, maupun multilateral dengan negara asing, organisasi internasional

pemerintah, organisasi internasional non pemerintah, dan organisasi/lembaga asing. Untuk mencapai sasaran dan target program Pengelolaan Kelautan dan ruang laut, DJPKRL memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak di dalam negeri seperti Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, swasta, perguruan tinggi, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun kelompok masyarakat. Penguatan dukungan dalam berbagai bentuk kerja sama dari luar negeri tidak luput dari sasaran potensial mitra kerja sama dalam akselerasi pencapaian program Pengelolaan Kelautan dan ruang laut. Kerja sama luar negeri dapat dijalin melalui kerja sama bilateral, regional, multinasional, lembaga internasional di bawah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Lembaga Donor, Non Government Organization (NGO) asing, maupun Organisasi Masyarakat Asing (Ormas Asing).

Untuk menentukan capaian pelaksanaan kerja sama bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut terdapat 3 Variabel Perhitungan, yaitu:

1. Persentase dokumen kerja sama yang disepakati (X1), Bobot Nilai 40%.
2. Persentase pemenuhan kertas posisi dalam pertemuan kerja sama luar negeri yang disusun (X2), Bobot Nilai 30%.
3. Persentase tindak lanjut kerja sama nasional yang telah disepakati (X3), Bobot Nilai 30%.

Persentase pelaksanaan kerjasama bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut: $X1 (40\%) + X2 (30\%) + X3 (30\%) = 100\%$

- Variabel persentase dokumen kerja sama yang disepakati (X1) dengan rumus: $(a)/b \times 100\%$
Keterangan: a = Dokumen kerja sama yang ditandatangani; b = Dokumen kerja sama yang diusulkan
- Variabel persentase pemenuhan kertas posisi dalam pertemuan kerja sama luar negeri yang disusun (X2) dengan rumus: $(a)/b \times 100\%$
Keterangan: a = Jumlah dokumen kertas posisi yang disusun; b = Jumlah pertemuan/perundingan perjanjian internasional
- Variabel persentase tindak lanjut kerja sama nasional yang telah disepakati (X3) dengan rumus: $(a)/b \times 100\%$
Keterangan: a = Capaian output setiap kegiatan (renaksi) b = Target output setiap kegiatan (renaksi)

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan I Tahun 2025

**Tabel 28 Capaian IK Presentase Pelaksanaan Kerjasama Bidang
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada Triwulan I Tahun 2025**

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut					
IK – 23	Presentase Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	100	-

A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2025

Capaian IK ini diukur secara tahunan, sehingga tidak terdapat target maupun capaian pada Triwulan I Tahun 2025. Namun, sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 telah dilaksanakan penandatanganan

1. Penandatanganan PKS antara DJPKRL dengan Yayasan Save the Children;
2. Penandatanganan PKS antara DJPKRL dengan Yayasan Care Peduli; dan
3. Penandatanganan PKS antara DJPKRL dengan FPIK IPB University
4. Penandatanganan naskah Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP dan Pemerintah Kota Palembang tentang Sinergi Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Sungai Musi.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024

Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2025.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

1. Keberhasilan
 - a. Dukungan dan partisipasi aktif dari unit kerja teknis Ditjen PKRL sebagai pemrakarsa kerja sama program PKRL dalam proses penyusunan naskah kerja sama.
 - b. Proses penandatanganan dokumen kerja sama program PKRL dilakukan secara desk to desk.
2. Kendala:
 - a. Komunikasi dan koordinasi di level internal masih perlu ditingkatkan terutama dalam penyelenggaraan seremonial penandatanganan naskah kerja sama.

- b. Proses reviu dan pengesahan naskah final dokumen PKS yang telah dibahas para pihak membutuhkan waktu lebih lama.
- 3. Solusi:
 - a. Diperlukan komunikasi aktif antara Para Pihak melalui pertemuan koordinasi agar memiliki kesepahaman yang sama dalam penyelenggaraan penandatanganan naskah kerja sama.
 - b. Meningkatkan koordinasi di level internal untuk mempercepat proses finalisasi naskah kerja sama yang telah dibahas para pihak

D. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025 meliputi:

1. Pemantauan dan Evaluasi Hibah Luar Negeri Lingkup DJPKRL Tahun 2024
2. Koordinasi Optimalisasi Penguatan Kerja Sama dan Data
3. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut ATSEA
4. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pemanfaatan CTI-CFF Tahun 2024
5. Rapat Koordinasi Penguatan Kerja Sama Antar Lembaga
6. Workshop Evaluasi Proyak GEF di Indonesi
7. Rapat pembahasan persiapan 3rd UNOC
8. Monev Kerja Sama bilateral Sektor Kelautan dan Perikanan
9. Profiling kegiatan/potensi pendanaan kolaboratif dengan mitra Tahun 2025 melalui pelaksanaan kerja sama lingkup KKP
10. Rapat MoU KKP RI – Mesir
11. Rapat Pembahasan Draft NK antara KKP dan Muhammadiyah
12. Sosialisasi Hasil SOM 19 dan MM ke-9 CTI-CFF dan Pertemuan Koordinasi Kegiatan SOMACORE Lesser Sunda Seascape
13. Rapat Masukan Joint Declaration RI - Norwegia dan Fisheries and Maritime Issues RI-Uni Eropa
14. Rapat Usulan Kerja Sama KKP – GGGI
15. Official Courtesy Visit to CTI-CFF CSO Chair.

IK 24. Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai Ketentuan

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrument alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).

Tujuan RB adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan RB memiliki dua sasaran utama yakni RB General dan RB Tematik.

Dokumen RB adalah dokumen yang terkait dengan rangkaian kegiatan dalam rangka melaksanakan RB General dan RB Tematik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Dokumen RB terdiri dari:

- 1) Dokumen rencana kerja RB general
- 2) Dokumen rencana kerja RB Tematik
- 3) Dokumen monitoring RB General
- 4) Dokumen monitoring RB Tematik.

Formula Perhitungan:

$$\frac{\text{jumlah dokumen RB yang diselesaikan}}{\text{jumlah dokumen RB yang ditentukan}} \times 100\%$$

Capaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut

Reformasi Birokrasi General dan Dimensi Reformasi Birokrasi Tematik. Indikator capaian pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi terdiri dari:

Reformasi Birokrasi General

No.	Indikator
1	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi
2	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
3	Indeks SPBE
4	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE
5	Indeks Perencanaan Pembangunan
6	Nilai SAKIP
7	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
8	Tingkat Maturitas SPIP
9	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan
10	Survei Penilaian Integritas (SPI)
11	Indeks Kualitas Kebijakan
12	Indeks Reformasi Hukum
13	Tingkat Digitalisasi Arsip
14	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
15	Indeks Tata Kelola Pengadaan
16	Opini BPK
17	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
18	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
19	Indeks Pengelolaan Aset
20	Indeks Sistem Merit
21	Indeks BerAKHLAK
22	Survei Kepuasan Masyarakat

23	Indeks Pelayanan Publik
24	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Reformasi Birokrasi Tematik

No.	Indikator
1	Pengentasan Kemiskinan: Nilai Tukar Petambak Garam

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan I Tahun 2025

Tabel 29 Capaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025

SK – 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut					
IK – 24	Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai Ketentuan					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw I	Target Tw I	Capaian Tw I	% Capaian	Kenaikan thd Tw I 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	100	-

- A. Capaian IK Triwulan I Tahun 2025
IK ini tidak memiliki target dan capaian triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan I Tahun 2025.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024
Capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 IK ini merupakan IK baru pada tahun 2025.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Tahun 2025 telah dilakukan oleh masing-masing penanggungjawab pada Eselon II sebagaimana dokumen RB yang telah terpenuhi.
- D. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan I Tahun 2025 telah dilaksanakan
 1. Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi General Tahun 2025

2. Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2025
3. Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Tahun 2025
Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2025

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran kegiatan yang mendukung kinerja Setditjen PKRL tercantum dalam Rencana Kinerja Anggaran DJPKRL pada kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup DJPKRL. Pagu anggaran di Lingkup Setditjen PKRL Tahun 2025 adalah Rp133.563.570.000,- dengan rincian anggaran per sumber dana, Rupiah Murni (RM) yang terblokir sebesar Rp101.063.570.000 dan PLN Rp32.500.000.000 dengan anggaran terblokir sebesar Rp25.262.283.000. Berdasarkan Memorandum Nomor 778.1/DJPKRL.1/KU.520/IV/2024 tanggal 24 April 2024 tentang Prosentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PKRL Triwulan I Tahun 2025, data realisasi anggaran di lingkup Setditjen PKRL berdasarkan Aplikasi OM-SPAN mencapai Rp17.959.229.961 atau 15,61%. Sedangkan berdasarkan Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran di lingkup Setditjen PKRL mencapai Rp19.992.027.104 atau 18,39% dari total pagu anggaran, rincian tercantum pada berikut.

Realisasi anggaran tersebut telah mendukung pencapaian indikator kinerja Setditjen PKRL, yang ditandai dengan tercapainya target beberapa indikator pada Triwulan I Tahun 2025 dan beberapa indikator yang sudah berproses untuk pencapaian targetnya. Berikut rincian realisasi anggaran di lingkup Setditjen PKRL sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 30 Realisasi Anggaran yang Mendukung Kinerja Setditjen PKRL per Unit Kerja di Lingkup Setditjen PKRL

URAIAN	PAGU + Blokir (Rp)	Blokir (Rp)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
Tim Kerja Program	5,640,782,000	2,129,479,000	3,511,303,000	396,815,765
Tim Kerja Pengelola Keuangan Dan Bmn (Gaji Dan Tunjangan)	70,520,735,000	-	70,520,735,000	16,608,514,197

URAIAN	PAGU + Blokir (Rp)	Blokir (Rp)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
Tim Kerja Pengelola Keuangan Dan Bmn (Non Gaji Dan Tunjangan)	2,225,000,000	1,414,891,000	810,109,000	545,800,068
Tim Kerja Sdma Dan Organisasi	2,883,000,000	2,635,307,000	247,693,000	41,706,801
Tim Kerja Hukum Dan Advokasi	3,607,000,000	3,275,936,000	331,064,000	72,079,564
Tim Kerja Humas Dan Pelayanan	2,695,000,000	2,084,744,000	610,256,000	159,769,146
Tim Kerja Kerjasama Dan Data	3,822,000,000	2,945,979,000	876,021,000	305,562,176
Tim Kerja Dukman	9,670,053,000	766,200,000	8,903,853,000	1,791,779,387
Total RM	101,063,570,000	15,252,536,000	85,811,034,000	19,922,027,104
Total Lainnya	32,500,000,000	10,009,747,000	22,490,253,000	-
Total Keseluruhan	133,563,570,000	25,262,283,000	108,301,287,000	19,922,027,104

Sumber: Realisasi Anggaran Akrua SAKTI, 27 Maret 2025

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Setditjen PKRL Triwulan I Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Setditjen PKRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Setditjen PKRL Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PKRL terdapat 24 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Setditjen PKRL. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Setditjen PKRL Triwulan I Tahun 2025 sebesar 108,86 (termasuk kriteria baik).

Pada Triwulan I Tahun 2025 terdapat 4 indikator yang memiliki target dan tercapai yakni 1) Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Setditjen PKRL tercapai 13,25% dari target 5%; 2) Laporan SPIP yang disusun Lingkup Setditjen PKRL tercapai sesuai target yakni 1 dokumen; 3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPKRL tercapai 88,64% dari target 85%; 4) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Setditjen PKRL tercapai 85,71% dari target 85%.

Pagu anggaran di Lingkup Setditjen PKRL Tahun 2024 adalah Rp133.563.570.000 dengan adanya blokir/bintang (*) pagu anggaran sebesar Rp25.262.283.000. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, realisasi anggaran di lingkup Setditjen PKRL mencapai Rp17.700.471.767 atau 13,25% dari total pagu anggaran.

4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Setditjen PKRL pada Triwulan II Tahun 2025, terdapat rekomendasi perbaikan untuk merevisi DIPA dengan menghilangkan alokasi anggaran yang diblokir dan menindaklanjuti temuan BPK secara berkala.

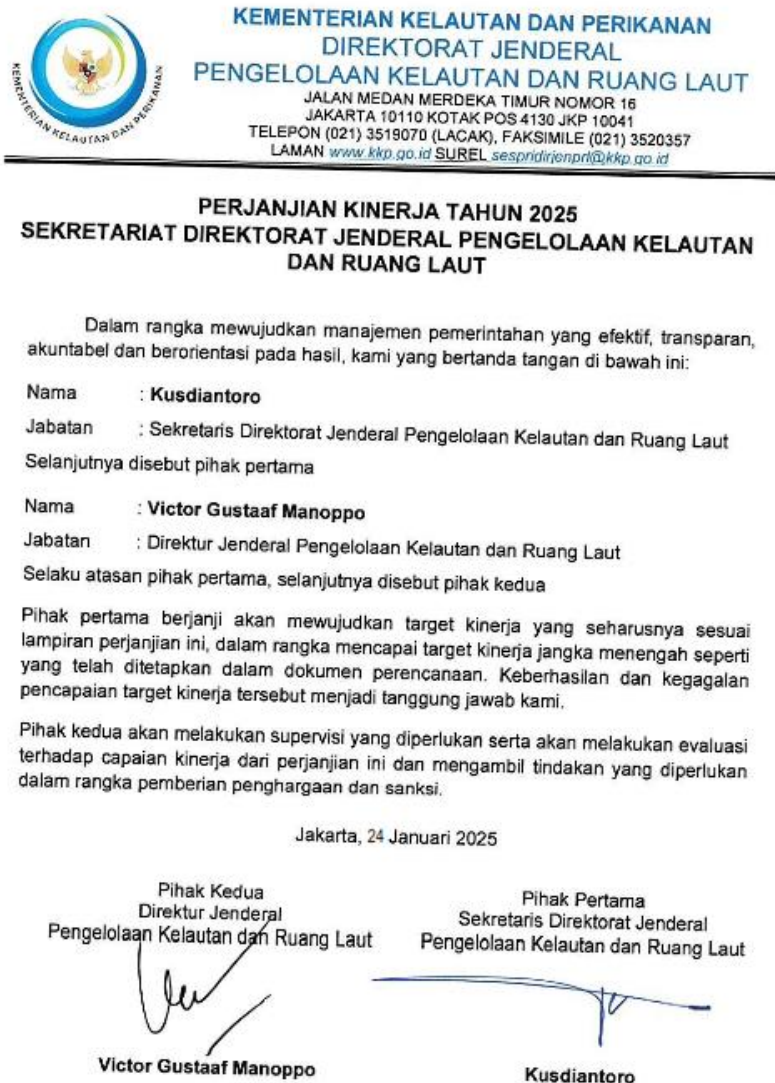
4.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya

Pada Tahun 2024 terdapat beberapa rekomendasi terhadap perbaikan kinerja Tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 31 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan dari Laporan Kinerja Setditjen PkRL Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Perlu dilakukan pemantauan rutin untuk memastikan kesesuaian perencanaan penarikan dana dengan realisasi kegiatan, terutama jika terdapat penambahan pagu anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai dengan perencanaan waktu pelaksanaan.	Telah dilakukan pemantauan rutin untuk memastikan kesesuaian perencanaan penarikan dana dengan realisasi kegiatan.
2.	Mengusulkan kembali kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun 2024 selama kegiatan tersebut masih relevan dengan pencapaian kegiatan.	Telah diusulkan kembali kegiatan Lautra pada tahun 2025 untuk melanjutkan pelaksanaan di tahun 2024.
3.	Mengoptimalkan pembayaran belanja kegiatan, salah satunya dengan menggunakan metode pembayaran Langsung (LS)	metode pembayaran Langsung (LS) telah digunakan untuk pembayaran belanja kegiatan
4.	Meningkatkan pengamanan dan penggunaan aset BMN, antara lain melalui pembuatan pagar dan papan plang di tanah PPKT dan penandatanganan penjanjian penggunaan BMN gedung Sekretariat Regional CTI-CFF	penandatanganan BAST penggunaan BMN gedung Sekretariat Regional CTI-CFF masih menunggu HCA ditandatangani oleh presiden

LAMPIRAN



**Gambar 3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2025**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
DAN RUANG LAUT

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	1. Nilai PM SAKIP DJPKRL (Nilai)	88
		2. Nilai PM SAKIP lingkup Setditjen PKRL (Nilai)	88
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Setditjen PKRL (Nilai)	92
		4. Persentase realisasi anggaran lingkup Setditjen PKRL (%)	95
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NPKA) lingkup DJPKRL (Nilai)	81,5
		6. Nilai maturitas struktur dan proses SPIP unit DJPKRL (Nilai)	3,5
		7. Laporan SPIP yang disusun lingkup Setditjen PKRL (Dokumen)	4
		8. Indeks profesionalitas ASN lingkup DJPKRL (Indeks)	87
		9. Indeks profesionalitas ASN lingkup Setditjen PKRL (Indeks)	87
		10. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPKRL (%)	85
		11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Setditjen PKRL (%)	85
		12. Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPKRL (%)	<0,5
		13. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Setditjen PKRL (%)	100
		14. Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis DJPKRL (%)	81
		15. Persentase pemenuhan dokumen pelayanan publik (%)	100

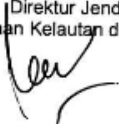
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		16. Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPKRL (%)	91
		17. Presentase penyelenggaraan Pengarus Utama Gender (PUG) lingkup DJPKRL (%)	100
		18. Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (%)	100
		19. Nilai pengawasan kearsipan internal DJPKRL (Nilai)	80
		20. Nilai pengawasan kearsipan internal ASN lingkup Setditjen PKRL	80
		21. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP DJPKRL (%)	76
		22. Nilai keterbukaan informasi publik DJPKRL (Nilai)	91
		23. Presentase pelaksanaan Kerjasama bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut (%)	100
		24. Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai ketentuan (%)	100

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	133.563.570.000
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2025		133.563.570.000

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Kusdiantoro